

## BAB V

### SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio keserasian yang terdiri atas rasio belanja rutin terhadap APBD dan rasio belanja pembangunan terhadap APBD, rasio pertumbuhan yang terdiri atas rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja rutin dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan daerah secara keseluruhan yang diukur dengan menggunakan beberapa variabel menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja sebelum dan sesudah otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $t$  hitung dan sig. (2-tailed) yang tidak signifikan.
2. Hasil analisis yang dilakukan dengan melakukan pengujian pada setiap rasio menghasilkan sebagai berikut :
  - a. Tingkat kemandirian Pemerintah Kota Madiun sebelum otonomi daerah tidak berbeda dengan sesudah otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Madiun dalam membiayai kegiatannya tidak berubah baik sebelum dan sesudah otonomi daerah. Bantuan pihak luar masih merupakan sumber utama dalam APBD.

- b. Tingkat belanja rutin Pemerintah Kota Madiun berbeda signifikan sebelum dan sesudah otonomi daerah yaitu lebih besar belanja rutin sebelum otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan belanja rutin Pemerintah Kota Madiun sebelum otonomi daerah lebih baik dari sesudah otonomi daerah .
- c. Tingkat belanja pembangunan Pemerintah Kota Madiun tidak berbeda sebelum dan sesudah otonomi daerah dikarenakan alokasi APBD masih diprioritaskan untuk belanja rutin sehingga mempengaruhi besarnya anggaran belanja pembangunan.
- d. Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berbeda sebelum dan sesudah otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya otonomi daerah belum mampu mendorong Pemerintah Kota Madiun untuk menggali PAD-nya sendiri.
- e. Tingkat pertumbuhan pendapatan sebelum otonomi daerah tidak berbeda signifikan dengan sesudah otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat masih menjadi sumber dana utama.
- f. Tingkat pertumbuhan belanja rutin sebelum otonomi daerah tidak berbeda dengan sesudah otonomi daerah. Hal ini menunjukkan kemampuan belanja rutin Pemerintah Kota Madiun dalam periode sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sama.

- g. Tingkat pertumbuhan belanja pembangunan sebelum otonomi daerah tidak berbeda dengan sesudah otonomi daerah yang disebabkan alokasi dana APBD yang masih diprioritaskan untuk belanja rutin.

## **B. Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan, adapun keterbatasan tersebut adalah :

1. Periode pengamatan data yang diambil masih kurang mungkin dengan menambah periode pengamatan akan menghasilkan kesimpulan lain.
2. Rasio untuk mengukur kinerja keuangan dalam penelitian menurut penulis masih kurang. Penambahan rasio akan mempengaruhi bagaimana menilai kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
3. Penelitian ini tidak melihat aspek kualitatif yaitu menilai kinerja pemerintahan dari aspek non finansial, sehingga penelitian ini kurang memberikan kesimpulan yang tepat mengenai kinerja Pemerintah Kota Madiun secara keseluruhan.
4. Sampel yang digunakan masih kurang, mungkin dengan menambah sampel seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur akan dapat dilihat bagaimana kinerja Pemerintah Kota Madiun dibanding kinerja daerah-daerah lainnya di kawasan Jawa timur.

### C. Saran

#### 1. Bagi Peneliti

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode pengamatan sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang berbeda.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian agar memperkuat pengujian. Misalnya, rasio efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) ditambah belanja rutin dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti kinerja Pemerintah Kota dengan menambah aspek non finansial/kualitatif. Misalnya, menilai bagaimana kinerja dari segi pelayanan publik.
- d. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel penelitian yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk melihat bagaimana kinerja Pemerintah Kota Madiun dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur.

## 2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota dalam memperbaiki kinerja selanjutnya khususnya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johan. 2005. "Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Fiskal Stress (Studi Terhadap Beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol.6.,No. 2.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta. BPFE
- Djarwanto. 1984. *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Yogyakarta : Andi.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
- Haryadi, Bambang. 2002. "Analisis Pengaruh Fiskal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur)". *Makalah Simposium Akuntansi V*. Ikatan Akuntansi Indonesia-Kompartemen Akuntan Pendidik.
- Indriantoro dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.2005. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mohamad Mahsun, Firma Sulistyowati, Heribertus A.P. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rahmat Tri haryadi. "Analisa Rasio Keuangan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah". *Artikel*. Edisi 45/Tahun XII/Mei 2005.
- Sadjiarto, Arya. 2000. "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2., No. 2.
- Santoso, Singgih.2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_.2001. *Buku Latihan SPSS Statistik Non Parametrik*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo.

Sohidin dan Ngadiman.2005. "Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Evaluasi Atas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali)". *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol. 2., No. 2.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.

Undang-Undang No. 33.,Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Waluya, Harry. 2001. "Analisis rasio PAD/APBD Terhadap Kebijakan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Agustus